

## **DPRD DAN PJ BUPATI KUDUS SEPAKATI RANPERDA APBD 2024, TARGET PENDAPATAN DAERAH Rp1,88 TRILIUN**



**Sumber Gambar:**

[https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2023/11/405126791\\_1076938700169807\\_2590592286905947096\\_n.jpg](https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2023/11/405126791_1076938700169807_2590592286905947096_n.jpg)

### **Isi Berita:**

KUDUS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus bersama Penjabat (Pj) bupati Kudus menyetujui Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Pada APBD 2024 dialokasikan pendapatan daerah sebesar Rp 1,88 triliun.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kudus Senin (27/11).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kudus H Masan tersebut, turut dihadiri secara langsung Pj Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggulangan, jajaran anggota dewan, pimpinan Forkopimda, serta para pimpinan OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Kudus.

Laporan Badan anggaran (Banggar) DPRD Kudus yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus Hj. Tri Erna Sulistyowati menyampaikan, bahwa badan anggaran DPRD Kabupaten Kudus bersama TAPD Kabupaten Kudus telah menyelesaikan pembahasan mengenai APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 untuk mendapatkan persetujuan bersama Pj Bupati Kudus.

Selanjutnya, Rancangan APBD Kudus 2024 tersebut akan diajukan ke Gubernur untuk proses evaluasi.

“Semoga Rancangan APBD Kabupaten Kudus 2024 ini bisa membawa manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Pj Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggungjian mengatakan, Ranperda Kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi.

Dia menyampaikan, APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan Rp 1,88 triliun.

Belanja daerah dianggarkan Rp 2,017 triliun, defisit Rp 138,2 miliar, serta pembiayaan netto Rp 138,2 miliar.

"Prioritas anggaran 2024 salah satunya adalah untuk kegiatan Pilkada nanti," ungkapnya.

Selain untuk kegiatan Pilkada, prioritas APBD 2024 untuk pekerjaan infrastruktur.

Peningkatan infrastruktur harus terus dilakukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kudus H. Masan mengapresiasi persetujuan Ranperda APBD 2024 ini telah disepakati antara legislatif bersama eksekutif.

Dia berharap APBD 2024 ini mampu membentuk dan membangun daerah.

Di sisi lain pada kesempatan yang sama, Masan juga menyepakati penyusunan 18 peraturan daerah (Perda) untuk masuk dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2024.

Dari usulan itu DPRD Kudus juga mengusulkan enam Perda Inisiatif pada tahun 2024.

"Keenam Ranperda inisiatif tersebut diantaranya, Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi," katanya.

Serta Ranperda tentang Sarana dan Prasarana Aktivitas Umum Lima Fasilitas, Ranperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Ranperda tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir. (gal/\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/693338152/dprd-dan-pj-bupati-kudus-sepakati-ranperda-apbd-2024-target-pendapatan-daerah-rp188-triliun>, "DPRD dan Pj Bupati Kudus Sepakati Ranperda APBD 2024, Target Pendapatan Daerah Rp1,88 Triliun", tanggal 28 November 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/11/28/dprd-kudus-dan-pj-bupati-tandatangani-persetujuan-ranperda-apbd-kudus-2024>, "DPRD Kudus dan Pj Bupati Tandatangani Persetujuan Ranperda APBD Kudus 2024", tanggal 28 November 2023.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*